

**EVALUASI PELAKSANAAN TATA KELOLA KAMPANYE, PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2018 DI KOTA PADANG PANJANG,
KOTA PARIAMAN DAN KOTA PADANG**

Tesis

*“Diajukan Kepada Tim Penguji Program Magister Administrasi Publik FIS UNP Sebagai Salah Satu
Syarat Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik”*



**NABELLA
NIM : 18208022**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Kota Padang Panjang, Kota Pariaman dan Kota Padang

Nabella

Public Administration Master Program
FIS Universitas Negeri Padang
Email: nabella033@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi dengan belum berjalan optimal pelaksanaan tata kolola pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 terutama pada pelaksanaan tata kelola kampanye, pemungutan dan penghitungan suara di Kota Padang panjang, Kota Pariaman, dan Kota Padang, karena masih terjadi permasalahan yaitu Administrasi data pemilih kurang akurat, kurangnya netralitas penyelenggara, partisipasi pemilih masih rendah, kampanye diluar jadwal, dan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan tata kelola kampanye, pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, dan Kota Padang.

Jenis penelitan ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, informan penelitian ditentukan secara *Purposive Sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi metode dan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan 2 (dua) cara yaitu menggunakan Analisis SWOT dan menggunakan Analisis data kualitatif melalui tahap pengelolaan data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, belum berjalan maksimal masih terdapat permasalahan. Dalam pelaksanaan tata kelola kampanye yaitu dikarenakan rendahnya regulasi yang ada, kurangnya pengawasan dari bawaslu pada saat kampanye, kurangnya kepatuhan peserta pilkada dalam Pemasangan Alat peraga kampanye dan Bahan Kampanye tidak sesuai dengan keinginan pasangan calon, dan masih banyak terjadi Kampanye tanpa pemberitahuan. Didalama pelaksanaan tata kelola pemungutan dan penghitungan suara masih terjadi permasalahan yaitu Ketidak Netralan ASN pada masa Pilkada, Penyelenggara KPPS tidak professional dalam melaksanakan tugas, DPT yang masih belum akurat walaupun sudah menggunakan sistem SIDALIH.

Kata Kunci : Pemilihan Kepala Daerah, Tata Kelola, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara

**Evaluation of the Implementation of Campaign Governance, Voting and
Vote Counting at the Simultaneous Regional Head Election
2018 in the city of Padang Panjang, Kota Pariaman
and Padang City**

Nabella

Public Administration Master Program
FIS Universitas Negeri Padang
Email: nabella033@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the fact that the implementation of the regional head election system in 2018 has not yet been optimal, especially in the implementation of campaign governance, voting and vote counting in the City of Padang Panjang, Pariaman City, and Padang City, because there are still problems namely the administration of voter data is inaccurate, lack of organizer neutrality, voter participation is still low, campaigns are out of schedule, and campaign props are not in accordance with the rules. The purpose of this study was to evaluate the implementation of campaign governance, polling and vote counting in the 2018 regional elections in Padang Panjang, Pariaman City, and Padang City.

This type of research is a qualitative research using descriptive methods, research informants determined by Purposive Sampling. Data collected through interviews and documentation studies. Data validity test is done through method triangulation and source triangulation. Data analysis technique uses 2 (two) ways, namely using SWOT analysis and using Qualitative data analysis through data management, Data Reduction, Data Presentation, and Conclusion Drawing.

The results showed that the implementation of the governance of local elections simultaneously in 2018, there was still not running optimally there were still problems. In the implementation of campaign governance that is due to the low regulation, lack of supervision from Bawaslu at the time of the campaign, lack of compliance of participants in the election of Campaign Props and Campaign Materials are not in accordance with the desires of the candidate pairs, and there are still many Campaigns without notice. In the implementation of the governance of voting and vote counting, there are still problems that occur, namely Non-Neutrality of Civil Servants during the elections, the KPPS Organizer is not professional in carrying out its duties, the DPT is still inaccurate despite using the SIDALIH system.

Keywords: Regional Head Election, Governance, Campaign, Voting and Vote Counting

PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Judul : Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Kampanye,
Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan
Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Kota Padang
Panjang, Kota Pariaman, dan Kota Padang

Nama : Nabella

NIM/TM : 18208022/2018

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 13 Februari 2020

Disetujui Oleh :

Pembimbing



Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D
NIP. 19581017/198503 1 001

LEMBARAN PENGESAHAN TESIS

Nama : Nabella
TM/NIM : 2019/18208022
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Kota Padang Panjang, Kota Pariaman dan Kota Padang


Tesis ini telah dipertahankan dihadapan sidang penguji Tesis Program Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang pada tanggal 7 Februari 2020 dan telah dinyatakan **LULUS**

Padang, 13 Februari 2020

Tim Penguji

Nama

1. Ketua : Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph. D
2. Anggota : Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D
3. Anggota : Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D

1. 
2. 
3. 

Mengesahkan
Di depan FIS UNP

Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum.
NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nabella

NIM / TM :18208022/2018

Tempat / Tanggal Lahir : Koto Baru Hiang / 12 Februari 1997

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, dan Kota Padang” adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam tesis ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Februari 2020

Yang membuat pernyataan



Nabella
18208022/2018

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rasa Syukur dan Tawakal, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah di Magister Administrasi Publik pada Universitas Negeri Padang, berupa penelitian yang dituangkan dalam bentuk Tesis yang berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Di Kota Padang panjang, Kota Pariaman, dan Kota Padang”**.

Shalawat dan Salam tak hentinya penulis ucapkan buat junjungan Nabi Besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia dan patuh hingga akhir zaman. *RAHMATAN LIL'ALAMIN.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik berupa materi, metodologi, analisa maupun cara penulisan huruf yang penulis terapkan pada penelitian ini. Oleh sebab itu, besar harapan penulis agar nantinya pembaca yang menyempatkan waktu untuk membaca Tesis ini dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan Tesis ini untuk masa yang akan datang.

Selama dalam penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari ide, saran, dorongan dan bimbingan serta masukan yang kreatif dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kerendahan hati pada

kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan Program Studi Magister Administrasi Publik.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D. sebagai Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Afriva *Khaidir*, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D. dan Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D sebagai tim penguji, yang telah banyak memberi masukan dan saran untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
4. Bapak Prof. Drs. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D. Ketua program studi Magister Administrasi Publik (M.AP) Universitas Negeri Padang (UNP).
5. Seluruh Dosen Prodi S2 MAP FIS UNP, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan sehingga sangat membantu dalam penyelesaian tesis ini.
6. Ketua KPU Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, dan Kota Padang yang telah memberikan data kepada penulis dalam melakukan penelitian.
7. Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, dan Kota Padang yang telah memberikan data kepada penulis dalam melakukan penelitian.
8. Ketua Partai Politik, LSM, dan PWI Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Padang yang telah memberikan data kepada penulis dalam melakukan penelitian.

9. Para rekan mahasiswa Prodi S2 MAP FIS UNP, khususnya teman-teman seperjuangan angkatan IX yang senantiasa memberikan dukungan dan masukan demi penyelesaian tesis ini.
10. Kedua orang tua tercinta Bapak Khairussaleh, SE dan Ibuk Khairiah. M. S.Pdi, yang selalu memanjatkan do'a kepada Allah SWT sehingga Tesis ini selesai dan memberikan bantuan baik moral maupun materil yang tak ternilai harganya bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
11. Teristimewa Kakakku Mory Purwa Ningsih, Amd.Keb. dan Ners. Padli, S.Kep, serta Keponakan tercinta Farisya Laiqa dan Qonita Sofya yang selalu memberikan semangat sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini.
12. Sahabat- sahabat penulis, Nur Putri Jayanti,, M.AP, Atiqa Azza El Darman, S.AP, Rizka Amanda Putri, S.sos, Fani Ratny Pasaribu, M.AP., dan Rezi Pebratama, M.AP. Yang selalu menghibur dan menyemangati penulis dalam penyelesaian tesis ini.
13. Adik- adik kos penulis, Fadilla Ulfa, Novita Sari, Indah Pertiwi, Magfira Deaputri, Nining Aulia Putri dan Sonia Isabela yang selalu menghibur dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
14. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penelitian dan penyusunan tesis ini.

Semoga segenap kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan untuk membantu menyelesaikan Tesis ini mendapat imbalan dari Allah SWT dengan

kemudahan dan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, *AMIN YA RABBAL'ALAMIN*.

Akhir kata penulis menyampaikan harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi mahasiswa untuk kepentingan kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang. Amin.

Padang, Februari 2020

Penulis

Nabella
NIM. 18208022

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	10
1. Tata Kelola Pemilu.....	10
2. Pemilihan Kepala Daerah.....	20
3. Kampanye.....	25
4. Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	32
B. Penelitian Relavan.....	35
C. Kerangka Berpikir/Konsptual.....	39
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
1. Wawancara.....	41

2. Studi Dokumentasi	42
D. Informan Penelitian.....	42
E. Teknik Pengujian Keabsahan Data	45
F. Teknik Analisis Data.....	46
1. Analisis Data Kualitatif	46
a. Reduksi Data	47
b. Penyajian Data	47
c. Penarikan Kesimpulan	47
2. Analisis SWOT	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	52
B. Temuan Khusus.....	82
C. Pembahasan.....	162

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	237
B. Implikasi	240
C. Saran	241

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 Informan Penelitian Kota Padang Panjang	43
2. Tabel 3.2 Informan Penelitian Kota Pariaman.....	44
3. Tabel 3.1 Informan Penelitian Kota Padang	44
4. Tabel 3.4 Matrik Swot	51
5. Tabel 4.1 Luas dan Kecamatan Kota Padang Panjang.....	54
6. Tabel 4.2 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa Kota Pariaman.....	63
7. Tabel 4.3 Luas dan Jumlah Kecamatan di Kota Padang.....	72
8. Tabel 4.4 Jumlah dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye	84
9. Tabel 4.5 Jumlah dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye.....	85
10. Tabel 4.6 Jadwal KampanyeRapat umum Kota Padang Panjang	89
11. Tabel 4.7 Anggaran Pembuatan Alat Peraga Kampanye	116
12. Tabel 4.8 Jadwal Kampanye Pilkada Kota Pariaman	119
13. Tabel 4.9 Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye.....	140
14. Tabel 4.10 Analisis SWOT Pelaksanaan tata kelola kampanye	190
15. Tabel 4.11 Analisis SWOT Pelaksanaan tata kelola pemungutan dan penghitungan suara	201
16. Tabel 4.12 Alternatif Evaluasi Pelaksanaan tata kelola kampanye	210
17. Tabel 4.13 Alternatif Evaluasi Pelaksanaan tata kelola pemungutan dan penghitungan suara	224

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1	Kerangka Berpikir/Konseptual.....	39
2. Gambar 4.1	Peta Kota Padang Panjang	54
3. Gambar 4.2	Struktur Organisasi KPU Kota Padang Panjang	58
4. Gambar 4.3	Struktur Organisasi Bawaslu Kota Padang Panjang	61
5. Gambar 4.4	Peta Kota Pariaman	64
6. Gambar 4.5	Struktur Organisasi KPU Kota Pariaman.....	67
7. Gambar 4.6	Struktur Organisasi Bawaslu Kota Pariaman.....	70
8. Gambar 4.7	Peta Kota Padang	74
9. Gambar 4.8	Struktur Organisasi KPU Kota Padang	78
10. Gambar 4.9	Struktur Organisasi Bawaslu Kota Padang	81
11. Gambar 4.10	Penertiban <i>oneway</i> Pada Angkutan Umum.....	86
12. Gambar 4.11	Keterbukaan Informasi KPU Padang Panjang	92
13. Gambar 4.12	Pelaksanaan Debat Pasangan Calon.....	95
14. Gambar 4.13	Penertiban Alat Peraga Kampanye Masa Teanang	117
15. Gambar 4.14	Keterbukaan Informasi KPU Kota Pariaman	122
16. Gambar 4.15	Keterbukaan Informasi Bawaslu Kota Pariaman	123
17. Gambar 4.16	Debat Publik Calon walikota Pariaman 2018	124
18. Gambar 4.17	Penghitungan suara hasil Pilkada Kota Pariaman.....	127
19. Gambar 4.18	Pemilih dan Pengguna HAK Pilih.....	128
20. Gambar 4.19	Penertiban Alat Peraga Kampanye.....	141
21. Gambar 4.20	Keterbukaan KPU memberikan Informasi	146
22. Gambar 4.21	Keterbukaan Bawaslu memberikan Informasi	147
23. Gambar 4.22	Perolehan suara di 11 kecamatan	156

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang dilandasi dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan negara, oleh karena itu sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan yang dilandasi pedoman dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, Hardiyanto (2016).

Menurut Harahap (2016) penyelenggaraan pemilu harus dapat menjamin penerapan prinsip demokrasi yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Pemilihan umum juga harus mengedepankan prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before of law*) dan kesamaan kesempatan dalam pemerintahan (*equal opportunity principle*). Prinsip persamaan ini bisa diwujudkan apabila ada partisipasi aktif penyelenggaraan pemilu dari masyarakat dan partai politik. Setiap proses pelaksanaan pemilu juga harus dipersiapkan secara matang oleh penyelenggara pemilu untuk menjamin suksesnya pesta demokrasi baik di tingkat nasional maupun lokal.

Sistem pemilu yang lebih terbuka menurut Labolo (2017:205) merupakan kemajuan bagi penyelenggaraan pemilu. Namun jika ditinjau dari perspektif kebijakan publik, ada suatu tantangan belum pernah dihadapi sebelum demokrasi

benar-benar diterapkan di Indonesia. Secara garis besar, semua ciri dasar bagi demokrasi yaitu pemilu yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat dan berserikat, hak untuk memilih, adanya sumber informasi alternatif, hak bagi semua orang untuk menduduki jabatan publik, serta kelembagaan yang memungkinkan rakyat bisa mengontrol pemerintahan yang telah dilaksanakan di Indonesia.

Pemilihan kepala daerah secara langsung sudah dilaksanakan beberapa kali sejak tahun 2005 sebagai perwujudan prinsip-prinsip demokrasi pada level daerah di Indonesia. Pilkada diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat, supaya menghasilkan kepala daerah yang aspiratif dan memiliki komitmen kuat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah sebagai sarana demokrasi perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tata kelola pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah sebagai sarana demokrasi tidak akan tercapai bila tidak didukung tata kelola pemilihan yang demokratis.

Berlangsungnya pemilihan kepala daerah hingga saat ini telah menimbulkan banyak catatan penting bagi pemerintah. Semenjak pemilu pertama hingga saat ini berbagai perubahan telah dilakukan untuk menemukan sistem pemilu yang cocok dan ideal bagi negara Indonesia. Namun, sampai saat ini kondisi yang ideal tersebut belum mampu di wujudkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika demokrasi yang berlangsung begitu cepat menuntut sistem pemilihan kepala daerah untuk dapat mengimbangnya.

Berbagai penelitian telah dilakukan tentang tata kelola pemilu maupun pemilihan kepala daerah, terutama yang berkaitan dengan kampanye dan pemungutan dan penghitungan suara. Seperti hasil penelitian menunjukkan berbagai permasalahan muncul dalam pelaksanaan kampanye seperti hasil penelitian Ahmad (2017) menunjukkan bahwa permasalahan terjadi saat kampanye yaitu sejumlah APK (Alat Peraga Kampanye) yang rusak atau hilang tidak digantikan oleh KPU Kabupaten, urutan nomor urut kandidat pada pemasangan APK terbalik, dan minimnya jumlah dan kualitas APK. Kemudian hasil penelitian Farida (2018) menunjukkan bahwa pelibatan anak dalam kampanye dan politik praktis, melaksanakan kampanye jauh-jauh hari sebelum waktu kampanye tiba. Selanjutnya hasil Penelitian Putri (2019) menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahap kampanye dan pemungutan dan penghitungan surat suara belum berjalan dengan efektif dan efisien, masih banyak pelanggaran dalam administrasi pemilih, kode etik, dan peraturan pelaksanaan pilkada.

Kemudian hasil penelitian tentang Pemungutan dan Penghitungan suara pada pemilu dan pilkada, seperti hasil penelitian dari Arifulloh (2015) menunjukkan bahwa administrasi data pemilih yang masih bermasalah, kurangnya netralitas penyelenggara pemilu, serta tidak patuhnya peserta pilkada dan partai politik terhadap peraturan yang berlaku. Berikutnya hasil penelitian Harahap (2016) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah serentak 2015 secara umum masih rendah dan untuk mendukung “keserentakan” pilkada perlu penyempurnaan asas pilkada serentak berdasarkan semangat efisiensi dan efektifitas.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat tahun 2015 juga bermasalah; diantaranya; sengketa hasil pemilihan kepala daerah; tingkat partisipasi pemilih pemilihan sangat rendah, model kampanye belum sesuai dengan karakter masyarakat Minangkabau, serta pengaturan penggunaan dana kampanye belum tegas (antara.sumbar.com/, 7 Maret 2016).

Dari hasil wawancara yang dilakukankan penulis di kantor KPU Kota Padang Panjang pada tanggal 29 April 2019 Hasil wawancara dengan Okta selaku Ketua KPU Kota Padang Panjang menjelaskan bahwa pada pemilihan walikota dan wakil walikota kota padang panjang terdapat beberapa permasalahan yang terdiri dari administrasi data pemilih yang masih belum akurat, Kurangnya netralitas dari penyelenggara dalam pilkada, dan kurangnya kepatuhan peserta pilkada dalam masa kampanye.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukankan penulis di kantor Bawaslu Kota Padang Panjang pada tanggal 2 mei 2019 Hasil wawancara dengan Dafit selaku Staf bidang Teknis di Kantor bawaslu Kota Padang Panjang, dari hasil wawancara terdapat beberapa permasalahan dalam pengawasan pilkada tahun 2018 yaitu kurangnya kepatuhan peserta pilkada massa kampanye dalam pemasangan spanduk, umbul-umbul dan juga kurangnya Netralitasnya penyelenggara pilkada di beberapa TPS.

Dari hasil wawancara yang dilakukankan penulis di kantor KPU Kota Pariaman pada tanggal 25 April 2019 Hasil wawancara dengan Aisyah selaku Ketua KPU Kota Pariaman beliau menjelaskan bahwa pada pemilihan walikota dan wakil walikota kota masih terdapat permasalahan yang terajdi dalam tata kelola

pemilihan seperti kampanye diluar jadwal, APK (Alat peraga kampanye) yang minim, administrasi data pemilih yang belum akurat, dan masih ditemui banyak penyelenggara yang yang tidak memahami dalam pengisian formulir di TPS.

Selanjutnya hasil observasi awal yang dilakukan penulis di Kantor Bawaslu Kota Padang tanggal 7 mei 2019 hasil wawancara dengan bapak Romi selaku kepala teknis penyelenggara pengawasan pemilu, dari hasil wawancara terdapat beberapa permasalahan dalam pengawasan yaitu kurangnya kepatuhan peserta pilkada dalam masa kampanye seperti pemasangan APK (Alat peraga kampanye) dan BK (Bahan Kampanye) yang tidak sesuai ketentuan, Kampanye di luar jadwal, keterlibatan ASN pada masa kampanye, kurang telitinya panitia penyelenggara KPPS dalam rekapitulasi hasil, terdapat kesalahan dalam penulisan, integritas penyelenggara pilkada masih rendah, dan partisipasi pemilih masih rendah.

Berdasarkan latar belakang, hasil penelitian sebelumnya dan hasil wawancara yang dilakukan penulis di kantor KPU dan Bawaslu di Kota Padang Panjang, KPU di Kota Pariaman dan KPU di Kota Padang, maka penulis tertarik meneliti tentang ***“Pelaksanaan Tata Kelola Pelaksanaan Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Kota Padang Panjang , Kota Pariaman dan Kota Padang”***.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Administrasi data pemilih yang belum akurat.
2. Kurang netralitas dari penyelenggara pilkada.
3. Partisipasi pengguna hak pilih masih rendah.
4. Rekapitulasi hasil suara rentan terhadap manipulasi.
5. banyak penyelenggara KPPS yang yang tidak memahami dalam pengisian formulir di TPS.
6. Integritas penyelenggara pemilu masih rendah.
7. Minimnya dan kurangnya kualitas APK (Alat peraga kampanye).
8. Kampanye melibatkan anak-anak.
9. Keterlibatan ASN pada masa kampanye
10. Kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan.
11. Kurangnya kepatuhan peserta pilkada dalam masa kampanye.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah dan identifikasi masalah maka penelitian ini difokuskan pada Pelaksanaan Tata Kelola Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018 di Kota Padang Panjang, Kota Pariaman dan Kota Padang, pembatasan masalah dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh kaitannya dari pelaksanaan tata kelola kampanye, pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 sehingga penelitian ini

bisa lebih fokus untuk dilakukan dan juga pelaksanaan tata kelola kampanye, pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 di Kota Padang Panjang, Kota Pariaman dan Kota Padang belum pernah diteliti sebelumnya.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi pelaksanaan tata kelola kampanye, pemungutan dan penghitungan suara pada pilkada serentak tahun 2018 di Kota Padang Panjang, Kota Pariaman dan Kota Padang?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tata kelola kampanye, pemungutan dan penghitungan suara pada pilkada serentak tahun 2018 di Kota Padang Panjang , Kota Pariaman dan Kota Padang?
3. Bagaimana solusi masalah dilakukan dalam pelaksanaan tata kelola kampanye, pemungutan dan penghitungan suara pada pilkada serentak tahun 2018 di Kota Padang Panjang, Kota Pariaman dan Kota Padang dengan menggunakan analisis SWOT?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini di lakukan dengan tujuan.

1. Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan tata kelola kampanye, pemungutan dan penghitungan suara pada pilkada serentak tahun 2018 di Kota Padang Panjang, Kota Pariaman dan Kota Padang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tata kelola kampanye, pemungutan dan penghitungan suara pada pilkada

serentak tahun 2018 di Kota Padang Panjang , Kota Pariaman dan Kota Padang.

3. Untuk mengetahui solusi masalah dilakukan dalam pelaksanaan tata kelola kampanye, pemungutan dan penghitungan suara pada pilkada serentak tahun 2018 di Kota Padang Panjang, Kota Pariaman dan Kota Padang dengan menggunakan analisis SWOT.

F. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi negara dalam kajian tata kelola pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Komisi Pemilihan Umum

Sebagai masukan bagi KPU dalam rangka membuat dan menjalankan suatu kebijakan yang dilakukan dalam tata kelola pemilihan kepala daerah.

- b. Bagi Bawaslu

Sebagai penemuan kendala-kendala dan sebagai masukan bagi Bawaslu dalam pengawasan pada pemilihan kepala daerah.

c. Bagi Partai Politik

Sebagai masukan bagi partai politik serta memberikan informasi kepada partai politik terkait dengan pelaksanaan tata kelola yang baik dan akutabel pada Pemilihan Kepala Daerah.

d. Bagi Peneliti Lain

Sebagai penambahan wawasan serta ilmu pengetahuan dasar untuk meneliti permasalahan pelaksanaan tata kelola pemilu atau pilkada secara umum dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan hasil pembahasan yang telah dilakukan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tata kelola kampanye pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 di Kota Padang Panjang, Kota Pariaman dan Kota Padang, dilihat dari prinsip kejujuran, Kejujuran dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye, dapat disimpulkan bahwa APK yang difasilitasi KPU banyak yang tidak terpakai karena tidak sesuai dengan yang diharpkn oleh tim pasangan calon, kemudian adanya penambahan APK dan Bahan kampanye.

Kejujuran dalam Pelaksanaan Jadwal Kampanye, disimpulkan bahwa masih terjadi kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh pasangan calon dan kampanye dimasa tenang dapat dikatakan bahwa masih banyak laporan memgeanai kampanye diluar jawdwal yang ditemukan Panwaslu. Kemudian Keterbukaan informasi, dapat disimpulkan KPU dan Bawaslu sangat terbuka mengenai informasi ke publik karena bisa dilihat di Website KPU dan Bawaslu. Selanjutnya Dialogis, dapat disimpulkan bahwa kampanye tatap muka antara pasangan calon berjalan sesuai peraturan karena tidak terjadi kerusahan pada saat debat.

2. Pelaksanaan tata kelola pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan kepala daerah serentah tahun 2018 di Kota Padang Panjangm Kota Pariaman, dan Kota Padang. Dilihat dari Proses Pemungutan dan penghitungan suara dapat

disimpulkan bahwa Proses Pemungutan dan penghitungan suara pada pilkada 2018 berjalan sangat terbuka, jujur dan tidak ada pengaruh dari pihak manapun. Kemudian Kenetralan Panitia dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ditemukan pelanggaran pada kenetralan Panitia di TPS tetapi Panwaslu langsung menindak lanjuti temuan tersebut. Kemudian Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dapat disimpullkan bahwa sampai saat ini DPT masih menjadi permasalahan umum pada pilkada dan pemilu tetapi sejak adanya sistem SIDALIH, nama ganda berkurang, sehingga partisipasi masyarakat meningkat dari pilkada sebelumnya.

3. Faktor-faktor dalam pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di kota padang panjang, kota pariaman, kota padang. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan kepala daerah srentak tahun 2018 di kota padang panjang, kota pariaman, dan kota padang, yang pertama faktor pada pelaksanaan tata kelola kampanye yaitu, Regulasi yang belum optimal, Pengawasan yang Kurang dari Panwaslu pada saat kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Tidak Sesuai yang Diinginkan Pasangan Calon,dan Jumlah penghasilan Pasangan Calon pada Pemilihan kepala daerah, Kemudia Faktor yang kedua yang mempengaruhi Pelaksanaan Tata kelola Pemungutan dan penghitunagn Suara yaitu, Pengisian Formulir pemilhan dan penghituagan di TPS (Panitia penyelenggara), Partisipasi Masyarakat, Logistik, Partisipasi pemilih dan Kenetralan Panitia di TPS.

4. Solusi masalah dilakukan dalam pelaksanaan tata kelola kampanye, pemungutan dan penghitungan suara pada pilkada serentak tahun 2018 di Kota Padang Panjang, Kota Pariaman dan Kota Padang dengan menggunakan analisis SWOT.
 - a. Memanfaatkan Potensi untuk meraih peluang:
 - 1) Perlu adanya inovasi baru dari pemerintah.
 - 2) Memperkuat kerjasama antara lembaga.
 - 3) Adanya kerjasama masyarakat dengan KPU dan Bawaslu dalam pelaporan temuan pelanggaran dengan sistem online.
 - 4) Memperbaiki sistem SIDALIH dalam membaca dan pengimputan DPT sehingga tidak ditemukan lagi nama ganda dan lain sebagainya.
 - b. Mengatasi kelemahan untuk meraih peluang:
 6. Pemerintah harus melakukan evaluasi mengenai Regulasi yang masih lemah,.
 7. Pelaksanaan bimtek kepada seluruh panitia ad hoc secara.
 8. Perlu dilakukannya pendidikan politik dan sosialisasi yang diwajibkan dilaksanakan setiap kelurahan/desa.
 9. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dikembalikan ke Tim pasangan calon.
 - c. Memanfaatkan potensi untuk menghadapi tantangan:
 - 1) Memperkuat pengawasan pada ketidak netralan ASN pada masa kampanye.
 - 2) Mempertegas pengawasan pada zona pemasangan sepanduk pada masa kampanye.
 - 3) Melibatkan pihak lain seperti TNI dan pihak kepolisian dalam pengawasan pilkada.

d. Meminimalkan kelemahan untuk bertahan dari ancaman:

- 1) Menindak lanjuti mengenai regulasi yang masih lemah,.
- 2) Memperkuat sanksi pada ketidak netralan ASN.
- 3) Memberhentikan secara paksa bagi panitia yang tidak netral dan tidak bertanggung jawab pada tugasnya.
- 4) Memperpanjang masa kerja panitia ad hock.

B. Implikasi

Berdasarkan temuan yang diperboleh, implikasi penelitian ini mencakup dua aspek yaitu sebagai berikut:

1. Implikasi teoritis, secara teoritis penelitian ini memiliki implikasi, dalam mengevaluasi kajian pelaksanaan tata kelola kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dengan pendekatan kualitatif terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, dan Kota Padang.
2. Implikasi praktis, secara praktis penelitian ini memiliki implikasi, yaitu
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan penemuan kendala-kendala dan sebagai strategi pengawasan bagi Bawaslu dalam pengawasan pada proses pelaksanaan tata kelola kampanye, pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan kepala daerah untuk pilkada kedepannya.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Komisi Pemilihan Umum dalam penemuan kendala-kendala dan pedoman untuk mengevaluasi dalam rangka membuat dan menjalankan suatu kebijakan yang dilakukan dalam tata kelola pemilihan kepala daerah.

- c. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi pedoman ilmu pengetahuan bagi anggota partai politik serta memberikan informasi kepada anggota partai politik terkait dengan pelaksanaan tata kelola kampanye, pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan kepala daerah untuk pilkada kedepannya.
- d. Hasil penelitian ini juga berguna Bagi Peneliti Lain sebagai penambahan wawasan serta ilmu pengetahuan dasar untuk meneliti kembali mengenai permasalahan pelaksanaan tata kelola kampanye, pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan kepala daerah lebih lanjut dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.

C. SARAN

Melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pada pelaksanaan tata kelola kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kota Padang Panjang, Kota Pariaman dan Kota Padang maka penulis menyarankan:

1. Pemerintah mengkaji, merevisi dan mengoptimalkan UU, PKPU dan penegakan hukum dalam pelanggaran pelaksanaan tata kelola pemilihan kepala daerah terutama pada proses tata kelola kampanye dan pemungutan dan penghitungan suara.
2. Perlu diperkuat penindakan hukum atas pelanggaran kampanye dan juga diharapkan proses demokrasi bisa memberikan contoh-contoh baik dalam berdemokrasi.
3. Sebaiknya Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye tidak lagi difasilitasi oleh KPU tapi dikembalikan ke Pasangan calon.

4. Perlunya Pengawasan dan sanksi yang lebih kuat pada Kenetralan ASN yang ikut serta dalam kampanye pemilihan kepala daerah serentak.
5. Perlu peningkatan pengawasan, pengaduan dan penegakan hukum terhadap praktik kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara.
6. Perlu Penguatan fungsi pengawasan dalam proses pemungutan suara.
7. Perlu dioptimalkan rekrutmen dan bimtek penyelenggara ad hoc.
8. Perlu ditingkatkan partisipasi partai politik dalam melakukan sosialisasi sehingga pemilih lebih mengenal keberadaan partai politik, visi, misi dan program partai politik dan calon kepala daerah maupun calek.
9. Kurangnya partisipasi pemilih maka Perlu adanya pendidikan Politik Bagi setiap masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang golpu lagi.
10. Sistim Informasi data Pemilih atau SIDALIH yang harus dioptimalkan kembali, Sehingga benar-benar tidak ditemukan lagi nama ganda dalam DPT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Adnan, M Fachri. 2012. *Perilaku memilih pada pemilihan kepala daerah secara langsung*. UNP Press. Padang.
- Afan, Gaffar, 2004, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, PustakaPelajar, Yogyakarta.
- Ahmad, Andi A. 2017. Pembatasan Kampanye Dan Rendahnya Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak 2015 Di Tiga Kabupaten Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Komunikasi KAREBA*. Vol.6 No.1 : 63-71.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arifulloh, Achmad. 2015. Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol.2.No.2 : 301-311.
- Daniri, Mas, Ahmad. 2005. “*Good Corporate Governmance*” Konsep dan penerapannya di Indonesia. Ray Indonesia.
- Eduardo, Luis. 2014. Electoral Governance: More Than Just Electoral Administration. *Jurnal Mexican Review Law*. Vol.VIII. No.1. 33-46.
- Farida, Ida. 2018. Pelibatan Anak Di Dalam Kampanye Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Uniga*. Vol. 6. No.2 : 145-156.
- Gutierrez, M. T. M. and P. (2012). Quality Management Systems and their Contribution to the Integrity of Elections. In International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).
- Harahap, Hasrul. 2016. Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Jurnal Renaissance*. Vol.1. No.1 : 17-23.
- Hardiyanto. 2016. Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/ 2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal). *Jurnal Varia Justicia*. Vol.12. No.1 : 204-221
- Helena Catt, dkk. 2014. *Electoral Management Design Revised Edition*. Internatinal IDEA.
- Hilda, Dinati F. 2017. Masyarakat Dan Malpraktek Pemilu. *Jurnal Bawaslu*. Vol.3 No. 3 : 421-435. ISSN 2443-2539.
- Jogiyanto. 2005. *Sistem Informasi Strategik untuk Keunggulan Kompetitif*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.